

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian terhadap kebijakan hukum pemerintah terhadap mekanisme persalinan dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Banyumas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi yang akan dilahirkan dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 4 tahun 2014 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita, kemudian kebijakan mengenai tarif atau besaran biaya persalinan, kebijakan mengenai penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar. Kabupaten Banyumas telah menetapkan Peraturan Bupati Banyumas yang mengatur standar operasional persalinan, tata cara pelayanan, dan biaya persalinan. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, baik itu di fasilitas kesehatan maupun di luar fasilitas kesehatan.
2. Dalam konteks persalinan di Kabupaten Banyumas, terdapat tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan aspek pidana, perdata, dan administratif. Dalam kesimpulan ini, dapat disimpulkan bahwa persalinan di Kabupaten Banyumas melibatkan tanggung jawab hukum pidana, perdata, dan administratif. Penting bagi pemerintah, tenaga medis, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memahami dan mematuhi tanggung

jawab hukum yang terkait dengan persalinan guna memastikan pelayanan yang aman, berkualitas, dan bertanggung jawab terhadap ibu dan bayi yang melahirkan.

B. SARAN

1. Berdasarkan penelitian mengenai kebijakan dan tanggung jawab hukum terkait mekanisme persalinan di Kabupaten Banyumas, terdapat beberapa kebijakan yang perlu dioptimalkan dalam pelayanan persalinan. Perlu adanya Koordinasi pemerintah dalam menjamin kelancaran persalinan di wilayah yang jauh dari pusat kota merupakan suatu upaya penting untuk memastikan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil yang tinggal di daerah terpencil atau terpencil. Koordinasi pemerintah melibatkan berbagai stakeholder seperti dinas kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, fasilitas kesehatan terdekat, transportasi, dan pemerintah setempat. Tujuannya adalah untuk membangun sinergi antara berbagai pihak yang terlibat dalam memberikan pelayanan persalinan yang aman dan berkualitas di wilayah terpencil.
2. Untuk mengoptimasi seluruh kebijakan yang sudah ada terkait dengan persalinan maka dibutuhkan *standar operating procedure* (SOP) yang optimal. Kebijakan hukum SOP persalinan harus didasarkan pada peraturan dan regulasi yang relevan, termasuk peraturan menteri kesehatan, peraturan daerah, dan standar nasional maupun internasional yang berlaku. Kebijakan ini harus mencakup langkah-langkah spesifik yang harus diikuti oleh tenaga medis dan petugas kesehatan dalam melakukan persalinan.